

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ALOKASI BELANJA
MODAL KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR**

Bayu Samodra

Email : bayuocean600@gmail.com

Jurusan Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183

No. Telp: 0274 387649 (hotline), 0274 387656 ext. 199/200 No. Fax: 0274
387649

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi belanja modal kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan data panel yang kombinasi 29 Kabupaten/Kota selama 2010-2014 dengan variabel pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dan belanja modal. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel yang diolah dengan model fixed effect.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal dan dana bagi hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Belanja Modal.

ABSTRACT

The study aims to determine the factors that affect the allocation of capital expenditures district and cities in the province of East Java. This study use panel data which is a combinacy 29 regency/city over periode 2010-2014, with variable local revenue (PAD), the general allocation fund (DAU), profit sharing fund (DBH), budget financing surplus (SiLPA), and capital expenditures. The analytical method used in this research is regression panel data that is processed by the fixed effect model .

The results of this study indicate that the variable revenue (PAD) positive and significant impact on capital expenditures , general allocation fund (DAU) positive and significant impact on capital spending , financing surplus budget (SILPA) positive and significant impact on capital spending , while profit sharing fund (DBH) positive dan significant effect on capital spending.

Keywords : locally generated revenue, general allocation fund, revenue sharing, financing surplus budget, capital expenditure

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campurtangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004).

Undang-undang tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam

belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum anggaran pendapatan belanja daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Di Indonesia, anggaran daerah biasa disebut dengan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 dalam Kawedar, dkk., (2008), APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat (Keefer dan Khemani, 2003).

Untuk Provinsi Jawa Timur sendiri, Realisasi anggaran belanja pada tahun 2014 sebesar Rp20.027.64 miliar rupiah atau menurun 4,36 persen dari yang ditargetkan. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 19,64 persen sebesar Rp17.372,65 miliar rupiah. Sedangkan untuk belanja modal di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 sebesar Rp1.207.456,621 miliar rupiah.

Tabel 1.1
Data Realisasi Belanja Modal di Masing-masing Provinsi
(Rupiah)

Daerah	2012	2013	2014
DKI Jakarta	8.784.365,760	10.696.012,194	10.411.118,390
Jawa Tengah	611.274,310	994.740,520	1.570.679,411
Jawa Barat	1.135.251,237	1.272.779,829	1.359.802,615
DI Yogyakarta	216.419,982	369.395,794	442.446,474
Jawa Timur	1.057.365,184	1.175.751,046	1.207.456,621

Sumber : Badan Pusat Statistik, bbrp terbitan

Dari Tabel 1.1, bahwa Belanja Modal pada Provinsi DKI Jakarta yang paling tinggi sebesar Rp10.411.118,390 miliar rupiah dibandingkan dengan Provinsi lainnya. Ini dikarenakan kebutuhan untuk daerah tersebut tinggi. Dengan besarnya pengeluaran biaya modal setiap Provinsi yang tinggi diharapkan bisa menyelesaikan masalah yang ada di masing-masing Provinsi.

Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur, peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Saragih, (2003)

menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan. Melihat fenomena yang terjadi, sepertinya alokasi belanja modal belum sepenuhnya dapat terlaksana bagi pertumbuhan kesejahteraan publik, sebab pengelolaan belanja daerah terutama belanja modal masih belum berorientasi pada publik. Salah satunya disebabkan oleh pengelolaan belanja yang terbentur dengan kepentingan golongan semata.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Keseluruhan realisasi anggaran pendapatan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 adalah sebesar Rp20.793.02 miliar rupiah, meningkat sebesar 6.17 persen dari yang ditargetkan. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, mengalami penurunan sebesar 16.69 persen sebesar Rp17.372,65 miliar rupiah. Sedangkan data Realisasi anggaran pendapatan asli daerah Jawa Timur pada tahun 2014 sebesar Rp14.462,75 miliar rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp11.596,37 miliar rupiah. sementara penerimaan dari sektor hasil pajak daerah sebesar Rp11.517.68 miliar rupiah, sektor retribusi daerah Rp148.638,04 miiyar

rupiah, sektor pengelolaan kekayaan daerah Rp342.920,27 miliar rupiah dan sektor penerimaan lainnya Rp2.453,50 miliar rupiah.

Tabel 1.2
Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing Provinsi(Rupiah)

Daerah	2012	2013	2014
DKI Jakarta	22.040.801,448	26.852.192,453	31.274.215,886
Jawa Tengah	6.629.308,010	8.212.800,641	9.916.358,231
Jawa Barat	9.982.917,415	12.360.109,870	15.851.202,864
DI Yogyakarta	1.004.063,126	1.16.102,750	1.464.604,954
Jawa Timur	9.725.627,569	11.596.376,615	14.442.216,520

Sumber : Badan Pusat Statistik, bbrp terbitan

Dari Tabel 1.2 diatas, diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling tinggi pada tahun 2014 yaitu Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp31.274.215,886 miliar rupiah, sementara itu Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2014 sebesar Rp14.442.216,520 miliar rupiah, PAD ini masih di bawah Provinsi Jawa Barat dengan total sebesar Rp15.851.202,864 miliar rupiah.

Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk

mengatasi ketimpangan fiskal ini pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah DAU yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya.

Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting. Dana Alokasi Umum (DAU) di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 sebesar Rp1.866.548,182 triliun rupiah, ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.496.594,268 triliun rupiah (BPS, 2014).

Selain dana transfer yang berupa dana alokasi umum ada juga dana bagi hasil (DBH) yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis, yaitu Dana Bagi Hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (SDA). Daerah yang memiliki kekayaan alam dan penghasilan pajak akan memiliki penerimaan daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerahnya. Hasil dari pengelolaan sumber daya tersebut dialokasikan kepada daerah-daerah dalam bentuk dana bagi hasil (DBH) dengan menggunakan prinsip by origin (daerah penghasil) serta melihat realisasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Bagi Hasil Atas Pajak di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 sebesar Rp1.123.170,764 miliar rupiah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.134.478,292 miliar rupiah. Sementara itu untuk Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 sebesar Rp393.742,118 juta rupiah (BPS, 2014).

Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, pemerintah memberikan dana perimbangan dan salah satu komponen dana ini yang memberikan kontribusi terbesar adalah dana alokasi umum (Adi, 2006). Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi dana alokasi umum (DAU) terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah

pusat masih tinggi. Namun demikian, dalam jangka panjang ketergantungan semacam ini harus menjadi semakin kecil. Berbagai investasi yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan memberikan hasil positif yang tercermin dalam peningkatan PAD.

Dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus berusaha semaksimal mungkin dalam meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi yang ada di daerah untuk dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah berupa PAD, sangat tergantung pada kemampuan daerah sendiri dalam menjaga potensi ekonomi potensi ekonomi menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan penambahan dalam pendapatan asli daerah.

Selain dari PAD dan transfer dari pusat untuk membiayai kegiatannya, Pemda juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Dalam acara penyerahan DIPA 2012 di Istana Negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia yang belum memuaskan dan menghendaki agar sisa anggaran tidak digunakan untuk keperluan yang tidak jelas namun dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Prasetyantoko (2008) menyatakan bahwa anggaran negara yang menganggur bisa dialokasikan untuk belanja

yang memberikan nilai tambah dan mampu menstimulasi laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, SiLPA pada tahun 2014 di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp.1.846.787,61 miliar rupiah perolehan ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp.1.153.509,52 miliar rupiah (BPS, 2014). Dengan adanya SiLPA ini diharapkan mampu meningkatkan anggaran belanja modal guna pembangunan infrastruktur di suatu daerah, sehingga bisa meningkatkan perekonomian daerah. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) dengan variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dengan kurun waktu satu tahun 2004-2005 dengan sampel pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa dan Bali.

Ada beberapa perbedaan dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa variabel yang berbeda. Selain itu, penulis juga menggunakan periode tahun yang berbeda yaitu pada kurun waktu lima tahun 2010-2014 serta objek dan lokasi yang diteliti juga berbeda yaitu Provinsi Jawa Timur. Daerah penelitian yang diambil merupakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, karena potensi lokal yang dimiliki tiap Kabupaten/Kota di Jawa Timur sangat memadai untuk digali dan lebih dikembangkan pengelolannya, apalagi Jawa Timur dikenal sebagai pusat kawasan timur pulau Jawa yang memiliki signifikansi perekonomian yang cukup tinggi. Selain itu Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki

jumlah Kabupaten/Kota terbanyak di Indonesia. Dengan penelitian lokasi yang dipilih ini diharapkan dapat memberikan informasi kondisi belanja modal saat ini yang ada di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan variabel yang berbeda yang judul penelitian sebagai berikut : **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ALOKASI BELANJA MODAL KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR”**.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengalokasian belanja modal di Provinsi Jawa Timur
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pengalokasian belanja modal di Provinsi Jawa Timur
3. Untuk mengetahui pengaruh pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pengalokasian belanja modal di Provinsi Jawa Timur.
4. Untuk mengetahui pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap pengalokasian belanja modal di Provinsi Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan, maka dalam menganalisis permasalahan (data) penulis menggunakan metode regresi data panel. Analisis dengan menggunakan data panel adalah kombinasi dari data *time series* dan *cross section*.

Persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DBH_{it} + \beta_4 SILPA_{it} + e_{it}$$

Keterangan :

Y = Belanja Modal (BM)

β_0 = Konstanta

β = Slope atau koefisien regresi atau intersep

PAD = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

DAU = Dana Alokasi Umum (DAU)

DBH = Dana Bagi Hasil (DBH)

SILPA = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

i = Kabupaten/Kota

t = Waktu

e_{it} = *error term*

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan uji untuk mengetahui apakah ada hubungan yang kuat (kombinasi linier) diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari R^2 dan F-statistik, t-statistik serta standar error. Kemungkinan adanya multikolinearitas jika R^2 dan F-statistik tinggi, sedangkan t-statistik banyak yang tidak signifikan atau rendah (uji tanda perubahan tidak sesuai dengan yang diharapkan).

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Jika varians berbeda, disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak adanya heteroskedastisitas. Pendeteksian heteroskedastisitas yang penulis gunakan dilakukan melalui uji white.

Metode Estimasi Data Panel

Dalam penggunaan metode regresi data panel pada umumnya terdapat tiga macam model, yaitu *Common Effects*, *Fixed Effects* dan *Random Effects Model*. Yang nantinya dari ketiga model tersebut akan dipilih salah satu model terbaik yang akan digunakan pada tahap analisis

selanjutnya. Maka dilakukan pengujian terlebih dahulu menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman.

Uji Kriteria Statistik(Uji F, Uji T, dan Koefisien Determinasi)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($\alpha = 5$ persen), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Jadi, bahwa variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Uji-t statistik adalah uji parsial (individu) dimana uji ini digunakan untuk menguji seberapa baik variabel bebas (variabel independen) dapat menjelaskan variabel terikat (variabel dependen) secara individu. Pada tingkat signifikansi (5%) dengan menganggap variabel bebas bernilai konstan.

Uji R^2 atau uji determinasi merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi, atau dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Nilai koefisien determinasi (R^2) ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Park

Variabel	Prob.
C	0.8286
LOG(PAD)	0.7117
LOG(DAU)	0.7422
LOG(DBH)	0.5196
LOG(SILPA)	0.4989

Dari Tabel diatas nilai probabilitas dalam penelitian ini lebih besar dari 5% ($>0,05$), maka dari itu data regresi dalam penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan sebagai variabel independen terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas adalah adanya hubungan linier antara variabel independen di dalam model regresi. Untuk menguji ada atau tidaknya multikolinieritas pada model, penelitian menggunakan metode parsial antar variabel independen. *Rule of thumb* dari metode ini adalah jika koefisien korelasi cukup tinggi di atas 0,85 maka diduga ada multikolinieritas.

Uji Multikolinearitas

	LOG(BM)	LOG(PAD)	LOG(DAU)	LOG(DBH)	LOG(SILPA)
LOG(BM)	1.000000	0.785036	0.732838	0.585033	0.760621
LOG(PAD)	0.785036	1.000000	0.669535	0.632393	0.747764
LOG(DAU)	0.732838	0.669535	1.000000	0.518372	0.694309
LOG(DBH)	0.585033	0.632393	0.518372	1.000000	0.626092
LOG(SILPA)	0.760621	0.747764	0.694309	0.626092	1.000000

Berdasarkan dari Tabel 5.2 diatas pengujian dengan metode korelasi parsial antar variabel independen diperoleh bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model.

Analisis Model

Uji Chow

Uji Likelihood

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.980573	(37,148)	0.0000
Cross-section Chi-square	131.236005	37	0.0000

Berdasarkan Tabel diatas, kedua nilai probabilitas *cross section F* dan *chi squared* adalah sebesar 0.0000 lebih kecil dari Alpha 0,05 sehingga menolak hipotesis nol. Jadi, model yang terbaik digunakan adalah dengan menggunakan metode *fixed effect*. Berdasarkan uji chow yang menolak hipotesis nol maka pengujian data berlanjut ke Uji Hausman.

Uji Hausman

Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob.
Cross-section random	10.956351	4	0.0271

Berdasarkan Tabel diatas nilai probabilitas *cross section random* adalah 0,0271 lebih kecil dari Alpha 0,05 sehingga menolak hipotesis nol. Berdasarkan uji hausman model yang terbaik digunakan adalah metode *Fixed Effect*.

Hasil Regresi

Hasil Estimasi Random Effect, Common Effect dan Fixed Effect

Variabel Dependen: Belanja Modal	Model		
	Random Effect	Common Effect	Fixed Effect
Konstanta	-0.981752 (1.142371)	0.300559 (0.850005)	-3.917192* (2.166347)
LOG(PAD)	0.290589*** (0.059382)	0.278070*** (0.046786)	0.301699** (0.121299)
LOG(DAU)	0.465275*** (0.114833)	0.414167*** (0.084511)	0.546091** (0.250141)
LOG(DBH)	0.042626 (0.060342)	0.039307 (0.054903)	0.162606* (0.085580)
LOG(SILPA)	0.258468*** (0.059054)	0.222782*** (0.056613)	0.289625*** (0.068835)
R ²	0.679092	0.716163	0.822170
F-statistik	100.9883	120.2188	22.31251
Probabilitas	0.000000	0.000000	0.000000

Ket:() = Menunjukkan standar error

***=Signifikan 1%, **=Signifikan 5%, *Signifikan 10%

Berdasarkan uji model yang telah dilakukan dari kedua analisis sebelumnya yaitu dengan menggunakan uji Likelihood dan Hausman test keduanya menyarankan untuk menggunakan *Fixed Effect*.

Hasil Estimasi Data Panel

Setelah melakukan pengujian statistik untuk menentukan model mana yang akan dipilih dalam penelitian, maka disimpulkan bahwa model *Fixed Effect* yang akan digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan model data panel yang kombinasikan data *time series* dan *cross section*. Berikut tabel yang menunjukkan hasil estimasi data menggunakan model *Fixed Effect*.

Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Variabel Dependen: Belanja Modal	Model
	Fixed Effect
Konstanta	-3.917192* (2.166347)
LOG(PAD)	0.301699** (0.121299)
LOG(DAU)	0.546091** (0.250141)
LOG(DBH)	0.162606* (0.085580)
LOG(SILPA)	0.289625*** (0.068835)
R ²	0.822170
F-statistik	22.31251
Probabilitas	0.000000

Ket: () = Menunjukkan standar error

***= Signifikan 1%

**= Signifikan 5%

*= Signifikan 10%

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan himpunan variasi variabel dependen. Hasil regresi dari faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi belanja modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur pada periode

2010 sampai 2014 yang terlihat pada Tabel 5.6 diperoleh R^2 sebesar 0.822170. Hal ini berarti 82,21 persen variasi variabel alokasi belanja modal di Jawa Timur mampu di jelaskan oleh himpunan variasi independen pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil dan sisa lebih pembiayaan anggaran. Sedangkan sisanya 17,79 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian ini.

Uji F

Uji F digunakan untuk signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara keseluruhan. Berdasarkan hasil analisis *Fixed Effect* diperoleh nilai probabilitas F sebesar 0.000000, yang dimana lebih kecil dari angka tingkat kepercayaan 1 persen, maka uji F signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur.

Uji T

Uji T bertujuan untuk melihat seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Uji T

Variabel	Koefisien Regresi	t-statistik	Prob.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0.301699	2.487229	0.0140
Dana Alokasi Umum (DAU)	0.546091	2.183131	0.0306
Dana Bagi Hasil (DBH)	0.162606	1.900047	0.0594
Sisa Lebih pembiayaan Anggaran (SILPA)	0.289625	4.207532	0.0000

Berdasarkan Tabel 5.7 dapat diketahui nilai koefisien untuk variabel pendapatan asli daerah Kabupaten dan Kota sebesar 0.301699 dengan probabilitas $0.0140 > 0.01$ pada tingkat kepercayaan 95 persen. Jadi dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten dan Kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Jawa Timur. Variabel dana alokasi umum mempunyai nilai koefisien sebesar 0.546091 dengan probabilitas $0.0306 > 0.01$ pada tingkat kepercayaan 95 persen. Jadi dapat diketahui dana alokasi umum Kabupaten dan Kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Jawa Timur. Variabel dana bagi hasil mempunyai nilai koefisien sebesar 0.162606 dengan probabilitas $0.0594 > 0.01$ pada tingkat kepercayaan 90 persen. Jadi dapat diketahui bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. Variabel sisa lebih pembiayaan anggaran mempunyai nilai koefisien sebesar 0.289625 dengan probabilitas $0.0000 < 0.01$ pada tingkat kepercayaan 1 persen. Jadi dapat diketahui bahwa variabel sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA)

berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur.

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disajikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. Pendapatan asli daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan meningkatnya PAD setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur sehingga alokasi anggaran untuk belanja modal juga mengalami peningkatan.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. Dana alokasi umum mempengaruhi secara nyata terhadap alokasi belanja modal dengan nilai koefisien yang cukup tinggi. Hal ini menandakan bahwa dana yang cukup besar yang berasal dari pemerintah pusat secara leluasa digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama peningkatan alokasi belanja modal sehingga meningkatkan pembangunan daerah.

3. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. Dana yang berasal dari pemerintah pusat berupa (DBH) masih diperlukan untuk meningkatkan alokasi belanja modal guna pembangunan infrastruktur setiap daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur.
4. Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. Bahwa SILPA tahun sebelumnya mampu menyumbang pemasukkan terhadap alokasi belanja modal guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama pembangunan infrastruktur.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota diharapkan dapat meningkatkan kemampuan merealisasikan pendapatan asli daerah dengan cara lebih intensifikasi pajak daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi pemungutan dan efisiensi administrasi pajak, serta perbaikan kontrol terhadap petugas untuk meminimalkan kebocoran. PAD dapat pula ditingkatkan dengan jalan meningkatkan peran perusahaan daerah melalui peningkatan laba usaha.

2. Pemerintah Daerah sebaiknya lebih mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk menambah penerimaan daerah seperti meningkatkan di sektor pariwisata di masing-masing daerah dengan meningkatnya sektor pariwisata ini diharapkan pendapatan setiap daerah mengalami peningkatan sehingga tercipta kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya sehingga pada akhirnya ketergantungan pada Pemerintah Pusat bisa dikurangi.
3. Sebaiknya Pemda Kabupaten dan Kota memprioritaskan anggaran untuk kepentingan publik dengan cara meningkatkan alokasi belanja modal untuk kepentingan publik. Sebab dengan meningkatnya alokasi belanja modal akan semakin meningkatkan investasi yang nantinya akan meningkatkan produktivitas masyarakat, sehingga akan kembali pada meningkatnya pendapatan daerah.
4. Dengan adanya sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) diharapkan pemerintah Kabupaten dan Kota bisa mengalokasikan ke belanja modal agar dana yang di peroleh untuk belanja modal akan meningkat sehingga pembangunan terhadap infrastruktur juga meningkat.

Keterbatasan Penelitian

1. Variabel penelitian yang mempengaruhi Alokasi Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur hanya terdiri dari empat variabel, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, sedangkan masih

banyak variabel lain yang berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

2. Tahun yang digunakan dalam penelitian ini hanya lima tahun yaitu dari tahun 2010 sampai 2014, sedangkan akan lebih baik digunakan dalam penelitian ini lebih dari lima tahun agar memperoleh hasil yang lebih baik lagi, hal ini disebabkan karena keterbatasan data dalam penelitian ini. Berdasarkan keterbatasan ini, diharapkan tidak mengurangi makna dan hasil signifikansi hasil penelitian, namun bisa dijadikan sebagai kesimpulan sementara untuk dijadikan acuan oleh penelitian lain di tempat yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Abimayu, 2005. *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*. Bapekki Depkeu.

Adi Priyo Hari, 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan, dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). *Simposium Nasional Akuntansi 9*, Padang.

Bada Pusat Statistik. 2010-2011. *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun 2012-2015*. <http://bps.go.id>.

Badan Pusat Statistik. 2010-2013. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun 2010-2011*. <http://bps.go.id>.

Badan Pusat Statistik. 2012-2015. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun 2012-2013*. <http://bps.go.id>.

Badan Pusat Statistik. 2014-2015. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun 2014-2015*. <http://bps.go.id>.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2012. *Provinsi Jawa Timur dalam Angka Tahun 2012*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2013. *Jawa Timur dalam Angka Tahun 2014*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2014. *Provinsi Jawa Timur dalam Angka Tahun 2013*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2014. *Statistik Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Surabaya.
- Basuki, A.T., dan Yuliadi, I., 2014, *Elektronik Data Prosesing (SPSS 15 dan Eviews 7)*, Danisa Media, Yogyakarta.
- Balitbang Provinsi NTT, 2008. "Analisis tentang tingkat efisiensi dan efektifitas pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Litbang NTT*, IV-03.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*, Makasar.
- Gujarati, Damodar N., & Porter, Dawn C. 2009. *Dasar-dasar ekonometrika (basic econometrics, 5th ed.)* (Eugenia Mardanugraha, Sita Wardhani, & Carlos Mangungsong, penerjemah). Salemba Empat, Jakarta.
- Halim dan Abdullah, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap dan Alfian, 2010. "Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara". *Skripsi*. Vol.7.No.87

In Indarti dan Sugiartina, 2012. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kota Semarang”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Volume 7 No. Desember 2012*.

Kusnandar, Dodik Siswanto, 2010. “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal”. *Jurnal Akuntansi, Vol 15: 2-3*.

Kajian Ekonomi Keuangan Regional Jawa Timur Triwulan IV 2014.

Kuncoro dan Mudrajat, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi Perencanaan, Strategi, dan Peluang*” Jakarta, Penerbit Erlangga.

Mardiasmo, 2002. “Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah”. *Makalah disampaikan dalam seminar pendalaman ekonomi rakyat*.

Prakosa, Kesit Bambang. 2004. “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah. *JAAI Volume 8 NO. 2 hal 101-118, Desember 2004*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Prasetyantoko, 2008. *Corporate Governance*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.

Rubin, Irene S, 1993. *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing*. Second edition. Chatham, NJ: Chatham House Publishers, Inc.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sianipar, Eva Septriani, 2011. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara”. *Skripsi*. Universitas Negeri Sumatera Utara, Medan.

Saragih, Juli Panglima, 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi Daerah*. Ghalia Indonesia.

Sidik dkk., 2002. *Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Mengacu pada Pencapaian Tujuan Nasional*. Seminar Nasional Publik Sektor, April, Jakarta.

Syaiful, 2008. *Pengertian dan Pemberlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal Dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan*. www.bappenas.go.id.

Setiawan, 2011. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah”. *Skripsi*. (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bandung).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Wahyuni dan Adi, 2009. Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Se Jawa-Bali). *National Conference UKWMS Surabaya*.

[Djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id).

[Http://www.Bi.go.id](http://www.Bi.go.id).